

KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK DALAM MENGHADAPI PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL PADA MASA COVID 19

Irma Hutagalung ^{1*}Desry Situngkir ²Bonaraja Purba ³^{1,2,3} Universitas Negeri Medan*e-mail : irmahutagalung74@gmail.com, desrysitungkir03@gmail.com bonarajapurba@gmail.com.

Abstrak

Kebijakan ekonomi politik global (EPG), adalah disiplin akademik dalam ilmu politik yang mempelajari ekonomi dan hubungan internasional. Setiap negara memiliki tugas untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Salah satu syarat yang dapat memenuhinya adalah melalui pertumbuhan ekonomi. Wajar pertumbuhan ekonomi menjadi penentu tingkat kesejahteraan, keamanan serta kemajuan sebuah negara. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan, semakin tinggi tingkat stabilitas politik, ekonomi dan keamanan. Pertumbuhan ekonomi dengan demikian bersifat global. Terlebih lagi perkembangan teknologi membuat dunia semakin kecil dan tanpa batas. Sebut saja ketika dunia percaya dengan sistem merkantilisme. Tujuan ekonomi politik meningkatkn kesejahteraan pendapatan pertumbuhan ekonomi yang dihadapkan dalam sistem ekonomi dunia.

Kata kunci : EPG, Ekonomi, Pertumbuhan

Abstract

Global political economic policy (EPG), is an academic discipline within political science that studies economics and international relations. Every country has a duty to create prosperity for its people. One of the conditions that can be fulfilled is through economic growth. It is natural that economic growth determines the level of prosperity, security and progress of a country. The higher the growth rate, the higher the level of political, economic and security stability. Economic growth is thus global. Moreover, technological developments make the world increasingly smaller and borderless. For example, when the world believes in the mercantilism system. The aim of the political economy is to increase welfare, income, economic growth faced in the world economic system

Keywords: EPG, Economy, Growth

PENDAHULUAN

Volatilitas ekonomi global pada kuartal keempat tahun 2022 ini cukup tinggi. Lonjakan signifikan harga pada sektor pangan dan energi pun mulai terasa di dunia. Ini disebabkan oleh penurunan tingkat stok penyediaan bahan pangan dan energi global. Krisis pada pangan dan energi membuat negara-negara global waspada akan tekanan inflasi dan juga resesi. Volatilitas ini juga menyebabkan ekonomi negara-negara dunia saling bergejolak satu sama lain. Terjadinya gejolak pasar global seperti pasar modal, pasar valuta asing (valas) serta pasar uang membuat perekonomian dunia menjadi terombang-ambing. Terombang-ambingnya ekonomi global merupakan awal dari krisis ekonomi global. Dewasa ini, dunia sedang dibayang-bayangi oleh fenomena-fenomena besar yang berpotensi dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi global. Untuk fenomena yang pertama adalah kenaikan suku bunga Amerika Serikat (The Fed). Kenaikan suku bunga ini mengakibatkan sulitnya perputaran uang terjadi. Hal ini juga menyebabkan biaya untuk pinjaman meningkat, pengurangan insentif investasi, pelemahan manufaktur serta pada akhirnya menyebabkan pemulihan ekonomi menjadi lambat. Fenomena ketiga yang dihadapi dunia adalah isu ketegangan geopolitik antara Rusia-Ukraina. Invasi militer Rusia ini menyebabkan tensi global meningkat secara signifikan karena terdapat pro dan kontra antar negara di dunia. Peningkatan tensi global ini menyebabkan perekonomian dunia terguncang. Terguncangnya perekonomian dunia ini ditandai oleh naiknya harga energi seperti minyak mentah dan harga pangan secara global. Fenomena ketiga yang dihadapi dunia adalah Scarring Effect akibat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 kemarin cukup memberikan dampak negatif pada perekonomian dunia, contoh untuk negara Indonesia di tahun 2020 pasar pekerjaan formal menurun di bawah 40%. Penurunan pasar pekerja ini mengakibatkan meningkatnya angka PHK yang merupakan wujud nyata dari scarring effect. Pertumbuhan ekonomi adalah Pendapatan

Domestik Bruto (PDB) dengan mengesampingkan faktor meningkat atau menurunnya jumlah pertumbuhan penduduk (Zulkarnain, 2017). International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2022 adalah 3,2%. Proyeksi ini jelas lebih rendah daripada Januari lalu, IMF memproyeksikan ekonomi global sebesar 4,1%. Proyeksi ini juga jauh lebih rendah daripada tahun 2021 yaitu sebesar 5,7%. Pada 2023 mendatang, IMF secara mengejutkan mempublikasikan kabar buruk bagi perekonomian dunia. IMF secara mengejutkan memotong proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi sebesar 2,9% pada 2023 mendatang. Dengan proyeksi IMF ini, akan banyak negara kesusahan dalam mendapat dana belanja negara dan kesusahan dalam mengelola pembiayaan. Akhirnya, banyak negaranegara akan menemui inflasi dan berakhir dengan resesi ekonomi yang suram. Resesi tahun 2023 akan dipicu oleh beberapa hal yaitu, penguatan dolar AS, konflik Rusia-Ukraina, Perubahan Iklim, Inflasi dan juga melemahnya kargo (krisis kargo). Indonesia sebagai bagian dari negara dunia sewajarnya sudah harus bersiap diri dalam menghadapi ancaman resesi 2023 mendatang. IMF berspekulasi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dan tahun 2023 mendatang masih akan dihantui oleh deselerasi global. Progress ekonomi Indonesia tumbuh sangat impresif pada kuartal II tahun 2022 yang berada di angka 5,4%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini diestimasi mencapai 5,1% secara tahunan. Namun, adanya volatilitas dan gejolak ekonomi global mengakibatkan tahun 2023 Indonesia mengalami perlambatan ekonomi. Sebagai negara berkembang Indonesia diprediksi mengalami inflasi sebesar 9,5% dan akan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,9%. Dengan adanya momentum seperti ini, Indonesia harus mulai berhati-hati dalam menetapkan kebijakan ekonomi guna memperkecil dampak dari resesi global 2023. Sejalan dengan isu dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 maka pemerintah perlu melakukan pencegahan ancaman resesi. Pencegahan resesi perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak, bahkan menghindari dampak resesi yang cukup ekstrim bagi masyarakat. Dampak seperti melonjaknya harga komoditas, meningkatnya tingkat PHK, bahkan sampai krisis energi. Inilah yang akan menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk melakukan pencegahan resesi. Diperlukan instrumen yang handal untuk menangkal ancaman ekonomi ini. Konsep yang dapat ditawarkan untuk mengatasi dan mencegah resesi 2023 adalah green economy. Green economy merupakan prinsip untuk memajukan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitar. Dunia saat ini menghadapi masalah serius berupa krisis pangan dan air, volatilitas harga komoditas dan energi, peningkatan emisi gas rumah kaca, kesenjangan pendapatan, ketidakseimbangan fiskal kronis dan terorisme (World Economic Forum, 2012). Sebagian besar negara maju menghadapi ketidakseimbangan fiskal yang kronis, sementara negara berkembang rentan terhadap masalah serius lainnya. Memenuhi permintaan dunia akan pangan, energi, dan infrastruktur yang terus meningkat dengan cara "seperti biasa" akan membuat dukungan ekologis dunia tidak dapat dicapai. Akibatnya, harga komoditas dan energi berfluktuasi, polusi tidak terkendali, kesehatan manusia terganggu, dan sistem keanekaragaman hayati hilang. Efek dari daya dukung alam yang terbatas dan pelaksanaan pembangunan bisnis seperti biasa telah mendorong kita untuk memikirkan konsep kebijakan pertumbuhan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan sumber daya alam yang terbatas dan upaya perlindungan lingkungan. Salah satu konsep yang relevan adalah pertumbuhan hijau. Pertumbuhan hijau dimaksudkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan (OECD, 2011a), efisien dalam penggunaan sumber daya alam yang bersih, meminimalkan polusi dan dampak lingkungan serta tahan bencana (World Bank, 2012a). Selain itu, pertumbuhan hijau menekankan pada kemajuan ekonomi yang ramah lingkungan dalam rangka mendorong pengurangan emisi dan pembangunan inklusif secara sosial (UNESCAP, 2010). Tujuan penelitian ini adalah menguraikan ekonomi hijau dalam rangka menghadapi ancaman resesi global 2023

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana mengatasi krisis ekonomi melalui kebijakn ekonomi polittik. Kami juga akan mengeksplorasi dampak krisis ekonomi, bagaiman mengontrol pengeluaran pemerintah.

Melalui pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan ekonomi polittik dalam mengatasi krisis ekonomi dalam kebijakan politik, kita dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat untuk mengurangi resesi atau bagaimana agar tidak terjadinya resesi yang di mana akan sangat berdampak pada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam hal ini. Untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal berdasarkan kebijakan ekonomi politik dalam mengatasi krisis ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan tujuan ini, dapat fokus pada analisis dampak kebijakan ekonomi yang didasarkan pada keijakan politik dalam mengatasi krisis ekonomi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

Resesi merupakan keadaan dimana perekonomian obsolet. Resesi ini biasanya ditandai dengan PDB sebuah negara menjadi negatif dan mulai muncul pengangguran. World Bank melalui publikasinya yang berjudul "Is a Global Recession Imminent" memproyeksikan bahwa tahun 2023 mendatang akan terjadi resesi global. Proyeksi ini semakin nyata dengan adanya indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi (Bisnis Indonesia, 1 Oktober 2022). Indikasi lainnya adalah banyak produsen-produsen mulai mengurangi jumlah produksinya akibat melemahnya permintaan pasar. Para penanam modal juga lebih memilih mengoper modalnya dalam mata uang dolar. Fenomena ultra-dollar memberi sinyal yang sangat kuat bahwa ekonomi dunia sedang bergerak menuju resesi (Kontan, 27 September 2022). Bagaikan guncangan ekonomi yang sangat besar, resesi ini menimbulkan cukup banyak dampak bagi kehidupan perekonomian di dunia. Pertama, Naiknya biaya hidup. Kondisi tersebut muncul dari momentum pemulihan ekonomi (pasca pandemi) yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan permintaan yang sangat signifikan, namun tidak dibarengi dengan pasokan yang memadai akibat terganggunya rantai pasokan global. Sejak awal tahun, masyarakat Indonesia sudah bergelut dengan kenaikan harga pangan dan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai berlaku pada awal September. Hal ini mendorong tingkat inflasi tahunan Indonesia menjadi sekitar 6% bulan lalu. Kedua, Sempitnya lapangan pekerjaan. Resesi yang besar akan menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah pekerjaan ini. Kontraksi di sektor produsen akan minimnya investasi membuat banyak kantor memilih untuk melakukan PHK di masa resesi. misalnya, perusahaan e-commerce seperti Shopee, JD.ID, LinkAja, TaniHub, dan Zenius memilih mengecilkan jumlah karyawannya. Ketiga, Degradasi pendapatan negara. Resesi global yang tinggi akan mengganggu aktivitas.

ekspor yang akhirnya akan membuat pendapatan negara melemah terutama Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rambu-rambu yang dapat kita lihat dari terganggunya aktivitas ekspor adalah neraca perdagangan menjadi defisit. Keempat, turunnya nilai tukar rupiah. dalam resesi investor akan cenderung menarik modalnya dari obligasi maupun saham. Hal inilah yang menjadi cikal bakal turunnya nilai tukar rupiah. Indonesia pernah mengalami resesi cukup besar dalam sejarah perekonomian yaitu pada 1998 yang membuat perekonomian indonesia hancur. Melonjaknya harga, turunnya nilai rupiah, tingginya tingkat PHK membuat awan kelam di masa itu. Sebagai strategi penyelamatan dari krisis 1998, paket subsidi likuiditas Bank Indonesia diterapkan untuk 16 bank. 670 miliar untuk reformasi hukum kebebasan pers dan hak asasi manusia. Pemerintah berlutut untuk menandatangani perjanjian dengan IMF untuk paket bantuan (pinjaman) multilateral senilai \$43 miliar sebagai bagian dari memorandum kebijakan ekonomi dan moneter. Kondisi krisis ekonomi 1998 sangat buruk bagi kepemimpinan dan birokrasi yang korupsi. Rupiah telah terdepresiasi 254% tahun-ke-tahun terhadap dolar AS. Rp3.030 (Sep 1997), Rp10.725 (Sep 1998), yang berada di atas level Rp16.000 inflasi 78,2% (Agustus 1998). Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmastuti dkk. membahas mengenai kebijakan yang diambil negara Indonesia dalam menghadapi acamana resesi yang diakibatkan Covid-19. Terdapat kesamaan dalam penyebab resesi saat pandemi dan pada tahun 2023 yaitu scaring effect. Diketahui bahwa kebijakan yang diambil oleh berfokus pada kebijakan fiskal dan penguatan sektor UMKM. Kebijakan fiskal dari pemerintah untuk menangani pandemi

dengan mengubah batasan defisit anggaran 3% dari PDB, dan mengalokasikan ulang APBN pada sektor yang berdampak besar pada perekonomian makro seperti pada sektor kesehatan, pengaman sosial, insentif pajak dan stimulus UMKM. UMKM yang menjadi salah satu sektor penyumbang PDB terbesar harus dilakukan transformasi dengan pengenalan teknologi digital pada kegiatan bisnis. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Soemartini yang menyatakan usaha pemerintah dalam menghadapi resesi dengan memprioritaskan bidang kesehatan jaminan sosial dan mengatur kebijakan moneter. Selain itu perlunya restrukturisasi pembiayaan untuk UMKM. Dari kedua literatur maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah resesi terjadi lebih parah perlu dukungan kebijakan fiskal dan moneter pada sektor-sektor prioritas agar menghidupkan kembali ekonomi yang mengalami perlambatan. Langkah yang diambil pemerintah sudah terlaksana dengan baik untuk memulihkan ekonomi. Akan tetapi, masalah resesi pada tahun 2023 akan lebih kompleks daripada saat pandemi Covid-19. Kebijakan yang diambil negara Indonesia dalam menghadapi resesi akibat pandemi Covid-19 berfokus pada kebijakan fiskal dan penguatan sektor UMKM. Kebijakan fiskal dari pemerintah untuk menangani pandemi dengan mengubah batasan defisit anggaran 3% dari PDB, dan mengalokasikan ulang APBN pada sektor yang berdampak besar pada perekonomian makro seperti pada sektor kesehatan, pengaman sosial, insentif pajak dan stimulus UMKM. UMKM yang menjadi salah satu sektor penyumbang PDB terbesar harus dilakukan transformasi dengan pengenalan teknologi digital pada kegiatan bisnis (Darmastuti et al, 2021) Usaha pemerintah dalam menghadapi resesi dengan memprioritaskan bidang kesehatan jaminan sosial dan mengatur kebijakan moneter serta restrukturisasi pembiayaan untuk UMKM (Soemartini, 2020). Inflasi terjadi akibat terlalu banyaknya jumlah uang yang beredar. Untuk dapat mengurangi dampak inflasi maka bank sentral dapat mengambil kebijakan moneter untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan cara meningkatkan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga akan menyesuaikan dengan besaran inflasi. Peningkatan inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga ikut meningkat (Mankiw, 2016)

METODE PENELITIAN

Metode menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pertanyaan yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala pada fakta yang ada (Ardianto, 2019; Semiawan, 2010). Metode kualitatif juga terbuka dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada proses penelitian (Ardianto, 2019). Penelitian ini dikatakan kualitatif karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya, dan hasil yang diharapkan pun bukanlah berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, melainkan makna atau segi kualitas dari fenomena yang di amati.

Dalam penelitian ini, peneliti menyelidik masyarakat-masyarakat yang mengalami dampak dari krisis ekonomi . Kasus-kasus dalam pendekatan ini dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah di tentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan ekonomi politik merupakan suatu kebijakan yang dapat mengatasi krisis ekonomi tentang interaksi atau hubungan dengan masyarakat. Menurut Waters (2001) basis utama dan berkelanjutan dari internasionalisasi ekonomi adalah perdagangan. Perdagangan itu sendiri dipahami sebagai aktivitas dua atau lebih individu yang bertukar barang dan jasa (O'Brien & Williams, 2020, p. 109). Kegiatan seperti ini akan disebut perdagangan internasional apabila dioperasikan di luar negeri. Salah satu cara perdagangan internasional mempengaruhi perekonomian global adalah melalui rezim perdagangan bebas. Konsep perdagangan bebas didasarkan pada logika keunggulan komparatif (Buchbinder & Rajagopal, 1996). Beberapa ahli juga mengatakan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan signifikan dalam tekanan krisis ekonomi global ,termasuk industri pariwisata,perhotelan dan lainnya.Masing-masing negara lebih fokus merespons Covid-19 dan memberlakukan pembatasan aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi global juga mengalami kontraksi. Pada saat yang sama, banyak negara yang melindungi pangan dari wabah Covid-19 yang berkepanjangan yang

telah menaikkan harga pangan karena pasokan yang tidak mencukupi. Indonesia juga mengalami resesi di penghujung tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu tahun 2023 mendatang diprediksi masih banyak negara yang belum sembuh total dari dampak covid-19. Kedua, perang Rusia-Ukraina. Ekonomi global belum pulih karena pandemi Covid-19, dan perang Rusia-Ukraina pecah. Perang Rusia-Ukraina yang dimulai Februari 2022 lalu telah merugikan PDB dunia sebesar \$2,8 triliun (Bisnis Indonesia, 2008). Perang Rusia-Ukraina mengganggu rantai pasokan global, memicu krisis, terutama di sektor pangan dan energi, yang pada gilirannya mempercepat inflasi.

Kenaikan suku bunga acuan secara simultan oleh bank sentral di seluruh dunia akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan dapat menyebabkan resesi global. Potensi ancaman dari resesi tahun 2023 mendatang haruslah disikapi dengan bijak. Langkah antisipatif haruslah diambil agar kinerja perekonomian tetap terjaga. Walaupun perekonomian bangsa Indonesia sedang tumbuh positif, kita tidak boleh lengah akan resesi. Apabila realisasi resesi global benar muncul maka ekonomi bangsa ini juga akan terjerumus ke dalam jurang yang dalam cukup tinggi. Selain itu, terdepresiasinya mata uang negara berkembang terhadap dollar membuat utang luar negeri meningkat dari yang sudah diprediksi. Agar dapat menjaga kondisi ekonomi tetap stabil pada kondisi inflasi yang tinggi maka insentif pajak dapat diberikan kepada para pekerja pada pajak penghasilan dan diberikan pada UMKM.

Untuk menghadapi perlambatan ekonomi global, kebijakan ekonomi politik dapat mencakup stimulus fiskal, kebijakan moneter akomodatif, reformasi struktural, dan kerja sama internasional. Stimulus fiskal melibatkan pengeluaran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara kebijakan moneter akomodatif dapat melibatkan penurunan suku bunga untuk merangsang investasi dan konsumsi. Reformasi struktural dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dalam jangka panjang. Kerja sama internasional penting untuk mengatasi dampak global dan memperkuat stabilitas ekonomi secara bersama-sama.

Dalam menghadapi perlambatan ekonomi global selama pandemi COVID-19, kebijakan ekonomi politik melibatkan langkah-langkah khusus untuk merespons tantangan tersebut. Beberapa strategi yang umumnya diterapkan antara lain:

1. Stimulus Fiskal: Pemerintah dapat memberlakukan paket stimulus fiskal untuk mendukung sektor-sektor terdampak dan meningkatkan belanja konsumen serta investasi.

2. Kebijakan Moneter Akomodatif: Bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk merangsang pinjaman dan investasi, serta meluncurkan program pembelian aset untuk menjaga likuiditas pasar.

3. Proteksi Sosial: Implementasi program-program proteksi sosial, seperti subsidi pengangguran dan bantuan sosial, untuk membantu warga yang terdampak langsung oleh dampak ekonomi negatif.

4. Pemulihan Sektor Kunci: Fokus pada pemulihan sektor-sektor kunci, seperti kesehatan dan teknologi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

5. Kerja Sama Internasional: Kolaborasi dengan negara-negara lain untuk memitigasi dampak global, termasuk dukungan pada program vaksinasi global dan kerja sama ekonomi.

6. Reformasi Struktural: Kesempatan untuk melakukan reformasi struktural guna meningkatkan ketahanan ekonomi, termasuk perubahan dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Perlu diingat bahwa pendekatan yang efektif dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi masing-masing negara dan tingkat dampak COVID-19 pada sektor ekonominya.

KESIMPULAN

Permasalahan yang akan dihadapi terdapat kesamaan dengan yang sudah terjadi akibat Pandemi Covid-19 yaitu terjadinya resesi tetapi terdapat perbedaan yang kontras saat ini yaitu meningkatnya suku bunga. Pemicu terjadinya resesi global tahun 2023 adalah dampak Pandemi Covid-19 yang masih terasa, perang Rusia-Ukraina, tingkat inflasi yang tinggi, dan kenaikan suku bunga. Solusi yang telah diterapkan sejak tahun 2020 memiliki dampak yang positif untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, beberapa solusi yang sudah ada diterapkan kembali dengan sedikit penyesuaian. Terdapat solusi untuk menghadapi ancaman resesi global yaitu penerapan Green Economy. Green Economy menerapkan kebijakan, digitalisasi UMKM, Ketahanan Pangan, Penguatan Arsitektur Kesehatan Global dan juga Transisi Energi Berkelanjutan. Digitalisasi UMKM dan pemberian insentif pajak telah berlangsung. Sedangkan Penguatan Arsitektur Kesehatan Global dan Transisi Energi Berkelanjutan mulai terdapat perencanaan untuk penggarapan. Digitalisasi UMKM diterapkan dengan adanya Fintech berlandaskan Payment Gateway dan Digital Marketing. Ketahanan pangan dapat melalui kebijakan fiskal untuk pemberian insentif perpajakan bea masuk pupuk dan pajak hasil pertanian. Peningkatan arsitektur kesehatan global diwujudkan dengan melalui program fokus terhadap distribusi kebutuhan kesehatan publik, pembiayaan kesiagapan pandemi, dan tata kelola kesehatan global. Transisi energi berkelanjutan fokus pada akses, teknologi, pendanaan, penerapan pajak karbon, dan perencanaan penerapan karbon.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Alwi, H. H., & Nirawati, L. (2022). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Bank Indonesia, dan Nilai Tukar Rupiah (USD/IDR) terhadap Indeks Saham Bisnis-27 di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 620– 635. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1242>
- Gilpin, R. (1987). *The Political Economy of International Relations*. Princeton : Princeton University Press.
- Goldberg, P. K., & Pavnick, N. (2004). Trade, Inequality, and Poverty: What Do We Know? Evidence from Recent Trade Liberalization Episodes in Developing Countries. *Brookings Trade Forum*, 223-69.
- Hankla, C. R., & Kuthy, D. (2013). Economic Liberalism in Illiberal Regimes: Authoritarian Variation and The Political Economy of Trade. *International Studies Quarterly*, 57(3), 492-502.
- Ahmad, S. (1990). *Pengantar Ekonomi Politik*. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- Dr.A.Razak, S. (Desember 2018). *EKONOMI POLITIK cetakan pertama*. ISBN: 978-602-5720-18-5.
- Dunia, E. (n.d.). *Ilmu Ekonomi Politik*. Retrieved From *Ensiklopedia Dunia*. https://P2K.Stekom.Ac.Id/Ensiklopedia/Ilmu_Ekonomi_politik.
- Nurjaman, A. (2020). *Ekonomi Politik Dalam Teori Dan Praktek*. Malang:Universitas Nuhammadiyah Malang.